

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :



Tata pamong, kepemimpinan,
sistem pengelolaan, dan
penjaminan mutu



M. Budi Djatmiko

Ketua Umum APTISI Pusat

Ketua Umum HPT Kes Indonesia

Pengaggas Akreditasi Mandiri dan Ketua LAM APTISI

**Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesi
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi**

I Hotels Batam, 11-12 januari 2017

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

Terdiri dari 16 pertanyaan

Dengan Total Bobot : **26.32**

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

1. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong (*governance*), kepemimpinan, dan sistem pengelolaan institusi perguruan tinggi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan institusi dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.
2. Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan institusi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik.
3. Perguruan tinggi dapat mempunyai lembaga-lembaga tertentu yang dianggap penting untuk menciptakan suatu tata pamong yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

4. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara institusi dengan para pemangku kepentingan.
5. Tata pamong yang baik memerlukan kepemimpinan yang baik di semua tingkatan unit kerja institusi. Kepemimpinan institusi yang baik tercermin pada kemampuan yang komprehensif untuk menumbuhkembangkan pemahaman dan komitmen di setiap unit kerja guna mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan sesuai dengan strategi-strategi yang dikembangkan dan harapan-harapan pemangku kepentingan.

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

- 6. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik. Sistem pengelolaan yang baik tercermin dalam keefektifan semua fungsi dan operasi manajemen di semua tingkat unit kerja perguruan tinggi.**
- 7. Penjaminan mutu perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.**
- 8. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi mencakup pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik.**

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

No. Butir Penilaian	BORANG PERTANYAAN	Bobot
2.1.1	Perguruan tinggi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).	1.48
2.1.2	Kelengkapan dan keefektifan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.	1.48
2.1.3	Keberadaan lembaga, mutu, SOP, dan efektifitas pelaksanaan kode etik.	0.74
2.2	Karakteristik kepemimpinan yang efektif dalam kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik.	1.48
2.3.1	Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup fungsi pengelolaan (<i>planning, organizing, staffing, leading, dan controlling</i>), yang dilaksanakan secara efektif untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi perguruan tinggi.	0.74

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

No.	No. Butir Penilaian	BORANG PERTANYAAN	Bobot
0	2.3.2	Perguruan tinggi memiliki analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit kerja.	0.74
1	2.3.3	Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	0.74
2	2.3.4	Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya.	0.74
3	2.3.5	Keberadaan dan keefektifan sistem audit eksternal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakannya untuk mengukur kinerja perguruan tinggi.	0.74
4	2.4.1	Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yang didukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan pelaksanaannya.	0.74
5	2.4.2	Implementasi penjaminan mutu.	0.37

KRITERIA PENILAIAN STANDAR 2 :

Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu.

o.	No. Butir Penilaian	BORANG PERTANYAAN	Bobot
6	2.4.3	Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, sarana prasarana, keuangan, manajemen, serta tindak lanjutnya.	0.37
7	2.4.4	Perguruan tinggi memiliki sistem pembinaan perguruan tinggi yang mencakup: (1) pengembangan perguruan tinggi, (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.	0.37
8	2.4.5	Kelengkapan dan aksesibilitas sistem basis data institusi yang mendukung penyusunan evaluasi diri institusi dan perguruan tinggi.	0.74
9	2.4.6	Status akreditasi BAN-PT untuk seluruh perguruan tinggi dalam perguruan tinggi.	14.83

2.1.1 PERGURUAN TINGGI MEMILIKI TATA PAMONG YANG MEMUNGKINKAN TERLAKSANANYA SECARA KONSISTEN PRINSIP-PRINSIP TATA PAMONG, TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN PELAKU TATA PAMONG (AKTOR) DAN SISTEM KETATAPAMONGAN YANG BAIK (KELEMBAGAAN, INSTRUMEN, PERANGKAT PENDUKUNG, KEBIJAKAN DAN PERATURAN, SERTA KODE ETIK)

Besarnya Bobot :

1.48

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi lima pilar berikut:

- (1) kredibel
- (2) transparan
- (3) akuntabel
- (4) bertanggung jawab
- (5) adil

→ **Point (3)**

Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi empat dari lima pilar berikut:

- (1) kredibel
- (2) transparan
- (3) akuntabel
- (4) bertanggung jawab
- (5) adil

Peraturan/pedoman/acuan terkait tata pamong

Kredibel : adanya legalitas lembaga serta WT, mekanisme pemilihan yang demokratis, adanya mekanisme yang jelas dalam penentuan kebijakan mutu, sasaran mutu, renstra dan RKAT

Transparansi : keterbukaan dan mekanisme komunikasi

Akuntabilitas : dokumen dan informasi yang dapat diakses, adanya audit internal dan eksternal

Tanggung jawab : pertanggung jawaban dalam forum resmi (rapat tahunan)

Keadilan : Terbukanya kesempatan

2.1.1 PERGURUAN TINGGI MEMILIKI TATA PAMONG YANG MEMUNGKINKAN TERLAKSANANYA SECARA KONSISTEN PRINSIP-PRINSIP TATA PAMONG, TERUTAMA YANG TERKAIT DENGAN PELAKU TATA PAMONG (AKTOR) DAN SISTEM KETATAPAMONGAN YANG BAIK (KELEMBAGAAN, INSTRUMEN, PERANGKAT PENDUKUNG, KEBIJAKAN DAN PERATURAN, SERTA KODE ETIK)

Besarnya Bobot :

1.48

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (2)**

Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi tiga dari lima pilar berikut:

- (1) kredibel
- (2) transparan
- (3) akuntabel
- (4) bertanggung jawab
- (5) adil

→ **Point (1)**

Dokumen, data dan informasi yang sah dan andal bahwa sistem tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, memenuhi 1 s.d. 2 dari lima pilar berikut:

- (1) kredibel
- (2) transparan
- (3) akuntabel
- (4) bertanggung jawab
- (5) adil

Peraturan/pedoman/acuan terkait tata pamong

Kredibel : adanya legalitas lembaga serta WT, mekanisme pemilihan yang demokratis, adanya mekanisme yang jelas dalam penentuan kebijakan mutu, sasaran mutu, renstra dan RKAT

Transparansi : keterbukaan dan mekanisme komunikasi

Akuntabilitas : dokumen dan informasi yang dapat diakses, adanya audit internal dan eksternal

Tanggung jawab : pertanggung jawaban dalam forum resmi (rapat tahunan)

Keadilan : Terbukanya kesempatan

2.1.2 KELENGKAPAN DAN KEEFEKTIFAN STRUKTUR ORGANISASI YANG DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN PENYELENGGARAAN DAN PENGEMBANGAN PERGURUAN TINGGI YANG BERMUTU

Besarnya Bobot :

1.48

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ Point (4)

Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang meliputi delapan organ dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

→ Point (3)

Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang hanya meliputi enam organ pertama dan satu dari dua organ lainnya, dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

→ Point (2)

Kelengkapan dan keefektifan, serta dokumentasi struktur organisasi yang hanya meliputi enam organ pertama dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

→ Point (1)

Lima organ pertama dalam struktur organisasi tidak lengkap

Struktur organisasi mengacu dalam 8 organ :

- 1) Pimpinan
- 2) Senat
- 3) Dewan pengawas
- 4) Dewan pertimbangan
- 5) Pelaksana kegiatan akademik
- 6) Pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung
- 7) Pelaksana penjaminan mutu
- 8) Unit perencanaan dan pengembangan tri dharma

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

2.1.3 KEBERADAAN LEMBAGA, MUTU, SOP, DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KODE ETIK

→ Point (4)

Pelaksanaan kode etik sangat lengkap, meliputi:

- (1) Lembaga tersendiri,
- (2) Mencakup masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik,
- (3) SOP sangat lengkap dan jelas,
- (4) SOP dilaksanakan secara efektif.

→ Point (3)

Pelaksanaan kode etik, meliputi:

- (1) Komisi *ad hoc*,
- (2) Mencakup masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), dan non-akademik,
- (3) SOP lengkap dan jelas,
- (4) SOP dilaksanakan secara efektif.

Badan Etika dan Hukum (BEH)

- ✓ Dewan pertimbangan pegawai
- ✓ Dewan Etika dosen

Pedoman yang digunakan BEH adalah kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, peraturan disiplin mahasiswa

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

Badan Etika dan
Hukum (BEH)

- ✓ Dewan
petimbangan
pegawai
- ✓ Dewan Etika
dosen

Pedoman yang
digunakan BEH
adalah kode etik
dosen, kode etik
tenaga
kependidikan,
peraturan disiplin
mahasiswa

2.1.3 KEBERADAAN LEMBAGA, MUTU, SOP, DAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KODE ETIK

→ Point (2)

Pelaksanaan kode etik:

- (1) Komisi *ad hoc*,
- (2) Hanya mencakup masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah),
- (3) SOP cukup lengkap dan jelas,
- (4) SOP dilaksanakan kurang efektif.

→ Point (1)

Pelaksanaan kode etik:

- (1) Tidak ada lembaga khusus,
- (2) Mencakup masalah akademik (termasuk penelitian dan karya ilmiah), disiplin,
- (3) SOP tidak ada.

2.2 KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF DALAM KEPEMIMPINAN OPERASIONAL, KEPEMIMPINAN ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN PUBLIK

Besarnya Bobot :

1,48

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

→ Point (4)

Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki karakteristik:

- (1) kepemimpinan operasional,
- (2) kepemimpinan organisasi,
- (3) kepemimpinan publik

→ Point (3)

Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki dua dari karakteristik berikut:

- (1) kepemimpinan operasional,
- (2) kepemimpinan organisasi,
- (3) kepemimpinan publik

Kepemimpinan operasional :
kemampuan menjabarkan visi, misi dan tujuan strategis dalam renstra dan RKAT

Kepemimpinan organisasional :
pemahaman tata kerja unit dalam organisasi (WT, tata kerja organisasi, mekanisme/prosedur kerja)

Kepemimpinan publik :
kiprah pimpinan di masyarakat

2.2 KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN YANG EFEKTIF DALAM KEPEMIMPINAN OPERASIONAL, KEPEMIMPINAN ORGANISASI, DAN KEPEMIMPINAN PUBLIK

Besarnya Bobot :

1,48

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

→ Point (2)

Kepemimpinan perguruan tinggi memiliki satu dari karakteristik berikut:

- (1) kepemimpinan operasional,
- (2) kepemimpinan organisasi,
- (3) kepemimpinan publik

→ Point (1)

Kepemimpinan perguruan tinggi tidak memiliki karakteristik berikut:

- (1) kepemimpinan operasional,
- (2) kepemimpinan organisasi,
- (3) kepemimpinan publik

Kepemimpinan operasional :
kemampuan menjabarkan visi, misi dan tujuan strategis dalam renstra dan RKAT

Kepemimpinan organisasional :
pemahaman tata kerja unit dalam organisasi (WT, tata kerja organisasi, mekanisme/prosedur kerja)

Kepemimpinan publik :
kiprah pimpinan di masyarakat

2.3.1 SISTEM PENGELOLAAN FUNGSIONAL DAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI MENCAKUP FUNGSI PENGELOLAAN (PLANNING, ORGANIZING, STAFFING, LEADING, DAN CONTROLLING), YANG DILAKSANAKAN SECARA EFEKTIF UNTUK MEWUJUDKAN VISI DAN MELAKSANAKAN MISI PERGURUAN TINGGI

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ Point (4)

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup semua (lima) fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.

Planning : perencanaan dilakukan secara terstruktur oleh rektor

→ Point (3)

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup empat dari lima fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.

Organizing : rektor dibantu oleh WR1, WR2, WR3 mengelola aktivitas, proses dan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kinerja institusi.

→ Point (2)

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi mencakup tiga dari lima fungsi pengelolaan yang dilaksanakan secara efektif.

Staffing : penempatan dan pengembangan personil mengacu pada struktur organisasi.

→ Point (1)

Sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi kurang (kurang atau sama dengan dua yang efektif).

Leading : Rektor menjalankan tugasnya sesuai dengan WT

Controlling : Melaksanakan fungsi pengendalian implementasi semua aktivitas

2.3.2 PERGURUAN TINGGI MEMILIKI ANALISIS JABATAN, DESKRIPSI TUGAS, PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL YANG MENJAMIN TERJADINYA PROSES PENGELOLAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI SETIAP UNIT KERJA

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ Point (4)

Perguruan tinggi memiliki:

- (1) rancangan dan analisis jabatan,
- (2) uraian tugas,
- (3) prosedur kerja,
- (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja, yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja.

Desain struktur organisasi

Deskripsi tugas tingkat universitas dan fakultas

Wewenang dan Tugas (WT)

Konsep yang dijalankan adalah Plan-Do-Check-Action. (dikti mengembangkan PPEPP)

Program kompetensi manajerial dilakukan secara berkala (pelatihan dosen, karyawan dan pimpinan)

→ Point (3)

Perguruan tinggi memiliki:

- (1) rancangan dan analisis jabatan,
 - (2) uraian tugas,
 - (3) prosedur kerja,
- yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja, tetapi tidak ada program peningkatan kompetensi manajerial perguruan tinggi.

2.3.2 PERGURUAN TINGGI MEMILIKI ANALISIS JABATAN, DESKRIPSI TUGAS, PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI MANAJERIAL YANG MENJAMIN TERJADINYA PROSES PENGELOLAAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DI SETIAP UNIT KERJA

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ Point (2)

Perguruan tinggi memiliki:

- (1) rancangan dan analisis jabatan,
- (2) uraian tugas,
- (3) prosedur kerja,

tetapi tidak menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja

→ Point (1)

Perguruan tinggi tidak memiliki:

- (1) rancangan dan analisis jabatan,
- (2) uraian tugas,
- (3) prosedur kerja,
- (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis untuk pengelola unit kerja.

Desain struktur organisasi

Deskripsi tugas tingkat universitas dan fakultas

Wewenang dan Tugas (WT)

Konsep yang dijalankan adalah Plan-Do-Check-Action.

Program kompetensi manajerial dilakukan secara berkala (pelatihan karyawan, dosen, pimpinan)

2.3.3 DISEMINASI HASIL KERJA PERGURUAN TINGGI SEBAGAI AKUNTABILITAS PUBLIK, SERTA KEBERKALAANNYA

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

→ **Point (4)**

Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua *stakeholders*, minimal setiap tahun.

→ **Point (3)**

Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala, tetapi hanya untuk internal *stakeholders*.

→ **Point (2)**

Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal *stakeholders*, tetapi tidak dilakukan secara berkala.

→ **Point (1)**

Perguruan tinggi tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada *stakeholders*.

Laporan Rektor

Laporan tahunan
kinerja unit

Berita : Koran ,
Majalah, Website,
dll.

2.3.4 KEBERADAAN DAN KEEFEKTIFAN SISTEM AUDIT INTERNAL, DILENGKAPI DENGAN KRITERIA DAN INSTRUMEN PENILAIAN SERTA MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGUKUR KINERJA SETIAP UNIT KERJA, SERTA DISEMINASI HASILNYA

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasil pengukurannya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

→ **Point (3)**

Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit, dan hasilnya digunakan tetapi tidak didiseminasikan.

→ **Point (2)**

Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian, menggunakannya untuk mengukur kinerja tiap unit tetapi hasilnya tidak digunakan serta tidak didiseminasikan.

→ **Point (1)**

Perguruan tinggi tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya.

Audit Mutu Internal :

- Prosedur Mutu Audit Internal
- Panduan Audit : Jadwal, agenda, lingkup, tugas auditor dan audite
- Kode Etik Auditor

Diseminasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.3.5 KEBERADAAN DAN KEEFEKTIFAN SISTEM AUDIT EKSTERNAL, DILENGKAPI DENGAN KRITERIA DAN INSTRUMEN PENILAIAN SERTA MENGGUNAKANNYA UNTUK MENGUKUR KINERJA PERGURUAN TINGGI

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Lembaga audit eksternal kredibel dan hasil auditnya digunakan serta didiseminasikan dengan baik.

→ **Point (3)**

Lembaga audit eksternal kredibel namun hasil auditnya tidak digunakan dengan baik atau tidak didiseminasikan dengan baik.

→ **Point (2)**

Lembaga audit eksternal kredibel, namun hasilnya sama sekali tidak ditindaklanjuti.

→ **Point (1)**

Tidak menggunakan lembaga audit eksternal.

ABED

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

ISO 17025

Akuntan Publik

Diseminasi dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

2.4.1 PERGURUAN TINGGI MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU YANG DIDUKUNG DENGAN ADANYA BUKTI-BUKTI BERUPA MANUAL MUTU, DAN PELAKSANAANNYA

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Manual Mutu yang lengkap meliputi:

- (1) Pernyataan Mutu
 - (2) Kebijakan Mutu
 - (3) Unit Pelaksana
 - (4) Standar Mutu
 - (5) Prosedur Mutu
 - (6) Instruksi Kerja
 - (7) Pentahapan Sasaran Mutu
- dan terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.

→ **Point (3)**

Manual Mutu yang lengkap, meliputi:

- (1) Pernyataan Mutu
 - (2) Kebijakan Mutu
 - (3) Unit Pelaksana
 - (4) Standar Mutu
 - (5) Prosedur Mutu
 - (6) Instruksi Kerja
 - (7) Pentahapan Sasaran Mutu
- tetapi tidak* terintegrasi dalam suatu sistem dokumen.

Perguruan Tinggi yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 atau 2015 yang sudah berafiliasi dg BAN PT dengan sendirinya telah terpenuhi

2.4.1 PERGURUAN TINGGI MENJALANKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU YANG DIDUKUNG DENGAN ADANYA BUKTI-BUKTI BERUPA MANUAL MUTU, DAN PELAKSANAANNYA

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

→ Point (2)

Manual Mutu yang hanya meliputi:

- (1) Pernyataan Mutu
- (2) Kebijakan mutu
- (3) Unit Pelaksana
- (4) Standar Mutu
- (5) Prosedur Mutu
- (6) Instruksi Kerja

→ Point (1)

Tidak ada manual mutu.

Besarnya Bobot :

0,37

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

2.4.2 IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU

→ Point (4)

Penjaminan mutu sudah berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

→ Point (3)

Penjaminan mutu sudah berjalan tetapi tidak di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monev dan audit.

→ Point (2)

Penjaminan mutu sudah berjalan yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, tindakan perbaikan tetapi *tidak* ada bukti dalam bentuk laporan monev dan audit.

→ Point (1)

Tidak ada pelaksanaan penjaminan mutu.

- Penetapan Norma, Standar, Program, Peraturan, manual
- Penyusunan perangkat sistem
- Implementasi
- Monitoring
- Pengukuran
- Audit mutu internal
- RTM dan Tindak lanjut

2.4. 3 MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENJAMINAN MUTU DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SARANA PRASARANA, KEUANGAN, MANAJEMEN, SERTA TINDAK LANJUTNYA

Besarnya Bobot :

0.37

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang

- (1) pendidikan
- (2) penelitian
- (3) PkM
- (4) sarana prasarana,
- (5) keuangan,
- (6) manajemen

yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.

→ **Point (3)**

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang

- (1) pendidikan
- (2) penelitian
- (3) PkM

yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta ditindaklanjuti.

- Pendidikan Penelitian, PkM dan Manajemen dilakukan lewat Audit Mutu Internal
- Sarana Prasarana dan Keuangan melalui Audit Mutu Internal dan Yayasan

2.4. 3 MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENJAMINAN MUTU DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SARANA PRASARANA, KEUANGAN, MANAJEMEN, SERTA TINDAK LANJUTNYA

Besarnya Bobot :

0.37

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ Point (2)

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu minimal di bidang

(1) pendidikan

(2) penelitian

(3) PkM

terdokumentasi ***tetapi tidak*** disosialisasikan dengan baik.

→ Point (1)

Pelaksanaan dan pencapaian sasaran penjaminan mutu di bidang

(1) pendidikan

tetapi tidak ada di bidang penelitian atau PkM

2.4.4 PERGURUAN TINGGI MEMILIKI SISTEM PEMBINAAN PROGRAM STUDI YANG MENCAKUP: (1) PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI, (2) PENYUSUNAN DOKUMEN AKREDITASI DALAM BENTUK PELATIHAN, DANA, DAN INFORMASI

Besarnya Bobot :

0.37

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Perguruan tinggi memberikan pembinaan sangat baik dalam:

- (1) pengembangan program studi,
- (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

→ **Point (3)**

Perguruan tinggi memberikan pembinaan baik dalam:

- (1) pengembangan program studi,
- (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

→ **Point (2)**

Perguruan tinggi memberikan pembinaan cukup dalam:

- (1) pengembangan program studi,
- (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

→ **Point (1)**

Perguruan tinggi memberikan pembinaan kurang dalam:

- (1) pengembangan program studi,
- (2) penyusunan dokumen akreditasi dalam bentuk pelatihan, dana, dan informasi.

BPA bertugas pengembangan konsep dan desain pendidikan/akademik.

Program BPM adalah membangun, implementasi, evaluasi dan pengembangan SPM terkait dengan akreditasi

Hibah prodi untuk peningkatan akreditasi

2.4.5 KELENGKAPAN DAN AKSESIBILITAS SISTEM BASIS DATA INSTITUSI YANG MENDUKUNG PENYUSUNAN EVALUASI DIRI INSTITUSI DAN PROGRAM STUDI

Besarnya Bobot :

0.74

Hal-hal yang perlu dibuktikan :

→ **Point (4)**

Basis data lengkap mencakup informasi tentang tujuh standar akreditasi untuk penyusunan dokumen evaluasi diri institusi maupun program studi, dan dapat diakses dengan mudah.

→ **Point (3)**

Basis data lengkap mencakup informasi tentang tujuh standar akreditasi, untuk penyusunan dokumen evaluasi diri institusi maupun program studi, namun kurang mudah diakses.

→ **Point (2)**

Basis data lengkap mencakup informasi tentang tujuh standar akreditasi, untuk penyusunan dokumen evaluasi diri institusi maupun program studi, namun sulit diakses.

→ **Point (1)**

Basis data kurang lengkap.

Sistem informasi

- Sistem informasi akademik
- Sistem informasi keuangan
- Sistem informasi perpustakaan
- Sistem informasi akuntansi
- SIM SDM
- SIM AMI (didesain untuk akreditasi)
- Atau dalam bentuk **ERP (Enterprise Resource Planning, perencanaan sumber daya perusahaan)**

Besarnya Bobot :

14,83

Hal-hal yang perlu
dibuktikan :

Hasil Akreditasi
tiap prodi dalam
bentuk sk dari
ban PT atau
Sertifikat dari
BAN PT

2.4.6 STATUS AKREDITASI BAN-PT UNTUK SELURUH PROGRAM STUDI DALAM PERGURUAN TINGGI

N_A = Jumlah program studi dengan status akreditasi A

N_B = Jumlah program studi dengan status akreditasi B

N_C = Jumlah program studi dengan status akreditasi C

N_K = Jumlah program studi yang status akreditasinya kadaluwarsa

N_O = Jumlah program studi yang belum terakreditasi

N = Jumlah seluruh program studi

$$= N_A + N_B + N_C + N_K + N_O$$

Catatan: Program studi yang dihitung adalah yang sudah memiliki izin operasional lebih dari dua tahun, dan sudah ada sistem akreditasi BAN-PT.

Rumus

$$\text{Skor} = (4 \times N_A + 3 \times N_B + 2 \times N_C + N_K + N_O) / N.$$

BUKTI YANG DIPERSIAPKAN DALAM PENILAIAN STANDAR 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

- 1. Perguruan tinggi memiliki tata pamong yang memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip-prinsip tata pamong, terutama yang terkait dengan pelaku tata pamong (aktor) dan sistem ketatapamongan yang baik (kelembagaan, instrumen, perangkat pendukung, kebijakan dan peraturan, serta kode etik).**
- 2. Struktur organisasi yang lengkap dan efektif sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan pengembangan perguruan tinggi yang bermutu.**
- 3. Kelembagaan kode etik.**
- 4. Karakteristik kepemimpinan yang efektif.**
- 5. Partisipasi pemangku kepentingan dalam menyusun rencana strategis (renstra).**

**BUKTI YANG DIPERSIAPKAN DALAM PENILAIAN STANDAR 2 :
Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan
mutu**

- 6. Sosialisasi renstra secara efektif dan intensif.**
- 7. Pelaksanaan renstra dalam bentuk program yang terintegrasi.**
- 8. Prosedur perencanaan dan implementasi kebijakan perguruan tinggi.**
- 9. Program peningkatan kompetensi manajerial untuk menjamin proses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit.**
- 10. Diseminasi hasil kerja perguruan tinggi sebagai akuntabilitas publik.**

BUKTI YANG DIPERSIAPKAN DALAM PENILAIAN STANDAR 2 : Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

- 1 1. Sistem audit internal yang efektif, menggunakan kriteria dan instrumen untuk mengukur kinerja setiap unit.
- 1 2. Keberadaan manual mutu.
- 1 3. Implementasi penjaminan mutu.
- 1 4. Monitoring dan evaluasi hasil penjaminan mutu minimal di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, aset, sarana prasarana, keuangan, manajemen.
- 1 5. Data dan informasi mutakhir tentang peringkat dan masa berlaku akreditasi perguruan tinggi.
- 1 6. Jumlah program studi Diploma, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi (untuk universitas, institut, dan sekolah tinggi) atau Diploma (untuk politeknik dan akademi) dengan peringkat akreditasi yang masih berlaku.

M Budi Djatmiko

layanandjatkiko@yahoo.com

layanandjatkiko27@gmail.com

0822-141414-27 (WA)

081-6420-6520

